

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan smart service dan menganalisis pelayanan tersebut apakah terintegrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah pelayanan dan peraturan mengenai perizinan berusaha didasarkan pada sistem Smart Service di Indonesia. Dalam pelayanan publik bidang perizinan berusaha dalam perspektif smart service di Indonesia. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan maksimal dalam pengurusan izin berusaha dengan menciptakan suatu sistem yang bernama Online Single Submission (OSS). Dalam pengimplementasi OSS informasi dan teknologi tersebut langsung diawasi oleh lembaga Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan izin secara OSS yang Terintegrasi dan secara daring sehingga pelaku usaha dapat melakukan pengurusan berusaha hanya secara daring dan online saja. Pemerintah melakukan pengembangan sistem OSS dari OSS 1.0 menjadi OSS berbasis resiko/RBA, hal tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berintegrasi berisiko. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan keefisiensi dalam melakukan kegiatan pengawasan berusaha yang lebih transparan dan terstruktur. Pada dasarnya aktualisasi dari pendekatan berbasis risiko didasarkan pada bidang negara yang menjalankannya. Dengan kata lain tidak ada metode yang baku mengenai pengaturan pendekatan yang berbasis risiko tersebut. Dimana pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko tertentu dari suatu kegiatan menjadi kegiatan dengan risiko tinggi sebagai sebuah prioritas oleh negara. Proses penilaian terhadap OSS berbasis risiko (OSS-RBA) dapat digolongkan menjadi tiga komponen risiko yakni rendah, menengah, dan tinggi. Komponen tersebut dapat digolongkan berdasarkan pada modal usaha. Risiko tingkat menengah rendah, pemohon izin hanya wajib memenuhi persyaratan standar sedangkan untuk risiko tingkat menengah dan tinggi perlu adanya lampiran tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas perlindungan lingkungan. Pada dasarnya kegiatan berbasis risiko rendah, menengah, dan tinggi memiliki perbedaan. Dimana sertifikat standar bagi kegiatan berusaha risiko tingkat menengah rendah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berwenang sedangkan sertifikat standar tingkat menengah tinggi diterbitkan oleh pemerintah pusat dan dapat diverifikasi melalui pemerintah daerah. Dengan terbitnya sertifikat OSS suatu usaha pemerintah akan melakukan pengawasan secara rutin dan insidental, dimana pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pembina dan pengawas.

Kata Kunci : *Pelayanan Publik, Perizinan Berusaha, Pespektif, Smart Service*

ABSTRACT

The author conducts this research using normative juridical research methods, namely studying one or several certain legal symptoms by analyzing them. The purpose of this research is to find out and analyze the regulation of public services in the field of licensing with smart services and analyze whether these services are integrated. The problems studied in this thesis research are services and regulations regarding business licensing based on the Smart Service system in Indonesia. In public services in the field of business licensing in the perspective of smart services in Indonesia. The government is trying to provide maximum service in managing business licenses by creating a system called Online Single Submission (OSS). In implementing OSS, information and technology are directly supervised by the One-Stop Integrated Investment Agency (DPMPTSP). Based on government regulation number 24 of 2018 which provides integrated and online OSS license services so that business actors can do business management only online and online. The government developed the OSS system from OSS 1.0 to risk-based OSS/RBA, this is contained in government regulation number 5 of 2021 which explains the implementation of risk-integrated business licensing. This development is carried out to increase the effectiveness and efficiency of conducting more transparent and structured business supervision activities. Basically, the actualization of a risk-based approach is based on the country field that runs it. In other words, there is no standardized method regarding the regulation of the risk-based approach. Where the approach used to identify certain risks of an activity becomes a high-risk activity as a priority by the state. The risk-based OSS assessment process (OSS-RBA) can be categorized into three risk components: low, medium, and high. These components can be classified based on business capital. For low-medium risk, license applicants are only required to fulfill standard requirements, while for medium and high risk, additional attachments issued by the environmental protection authority are required. Basically, low, medium and high risk activities have differences. Where the standard certificate for low-medium level risk business activities is determined by the authorized local government while the high-medium level standard certificate is issued by the central government and can be verified through the local government. With the issuance of an OSS certificate, the government will carry out routine and incidental supervision, where routine supervision is carried out by following the standard norms and criteria set by the ministry or supervising and supervising agency.

Keywords: *Public Services, Business Licensing, Smart Service*